

juga dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor seperti pada kasus yang pertama. Pegadaian Syariah merespon permohonan nasabah tersebut dengan melakukan survey. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan menyerahkan semua persyaratan kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah permohonan memenuhi persyaratan maka Pegadaian Syariah merealisasikan pembiayaan *ARRUM* tersebut sebesar Rp 3.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Maka setiap bulanya diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar Rp 280.000,00. Untuk biaya penyewaan deposit box sebagai tempat penyimpanan BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan akad *ijārah*, sebesar 1% setiap bulan dari jumlah setiap bulan dari jumlah hutang yang disetujui Rp 3.000.000,00 dengan angsuran *ujrah* tiap bulan sebesar Rp 30.000,00.

4. Pada kasus yang keempat nasabah yang bernama Noviya Ariesandi yang beralamatkan di jalan Banyu Urip Wetan tengah NO 52 mengajukan permohonan pembiayaan *ARRUM* sebesar Rp 15.000.000,00 untuk mengadakan usaha juga dengan menjaminkan BPKB mobil. Pegadaian Syariah merespon permohonan nasabah tersebut dengan melakukan survey. Selanjutnya pihak Pegadaian Syariah menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan menyerahkan semua persyaratan kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah permohonan memenuhi persyaratan maka Pegadaian Syariah merealisasikan pembiayaan *ARRUM* tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 dengan jangka waktu 2 tahun. Maka setiap

bulanya diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar Rp 775.000.00. Untuk biaya penyewaan deposit box sebagai tempat penyimpanan BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan hutang dengan menggunakan akad *ijārah*, sebesar 1% setiap bulan dari jumlah setiap bulan dari jumlah hutang yang disetujui Rp 15.000.000,00 dengan angsuran *ujrah* tiap bulan sebesar Rp 150.000.00

Fakta di atas memperlihatkan bahwa nasabah pertama dan ketiga sama-sama melakukan pembiayaan *ARRUM* dengan menggunakan akad *ijārah* dan sebagai jaminannya, BPKB motor dengan tahun yang sama dan merek motor nya sama di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, ternyata kewajiban membayar sewa pada penyimpanan di deposit box tidak sama. Nasabah yang pertama membayar *ujrah* pada deposit box Rp 50.000,00 dan nasabah yang kedua membayar angsuran dengan *ujrah* pada deposit box Rp 30.000,00. dalam setiap bulan.

Berdasarkan dengan praktek pelaksanaan *ujrah* tempat penyimpanan deposit box, biaya perawatan dan keseluruhan proses dalam akad *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. Memperlihatkan adanya segi yang bisa untuk dikaji dan diamati dengan seksama untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di baliknya, terutama menyangkut pada pertimbangan hukum Islam yang melandasi tindakan lembaga tersebut untuk membebaskan *ujrah* yang disesuaikan dengan jumlah hutang. Oleh karena itu maka perlu diadakan kajian dari

peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi atau duplikasi secara mutlak.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *Ujrah Deposit Box* Pada Produk Pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* Usaha Mikro) di Pegadaian Syari’ah Cabang Blauran Surabaya.” Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang mengkaji masalah yang terkait dengan *ujrah* pada tarif deposit box. Namun ada beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan permasalahan yang akan dikaji, antara lain dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam tentang Dua Akad (*rahn* dan *ijārah*) dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Baba’an Surabaya, yang ditulis oleh Musrifah pada Tahun 2005.¹⁴ Untuk menjawab pertanyaan mengenai permasalahan yang dibahas Musrifah yaitu tentang satu transaksi dengan dua akad (*rahn* dan *ijārah*) 1. Bagaimana deskripsi dua akad *rahn* dan *ijārah* di pegadaian Syariah Bada’an Surabaya? 2. Mengapa terjadi dua akad *rahn* dan *ijārah* dalam satu transaksi di pegadaian Syariah Bada’an Surabaya? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek dua akad *rahn* dan *ijārah* dalam satu transaksi di pegadaian Syariah Bada’an Surabaya?. Dengan akad *rahn* transaksi yang dilakukan nasabah untuk memperoleh pinjaman dengan satu jaminan kepada Pegadaian Syariah Badaan Surabaya dan dengan akad *ijārah*

¹⁴ Musrifah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Dua Akad (rahn dan ijarah) dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Baba’an Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2005.

transaksi yang dilakukan Pengadaian Syariah Babaaan Surabaya untuk pemeliharaan dan keamanan barang jaminan dari nasabah, hal ini merupakan suatu bentuk tolong menolong dan kerjasama. Pada akad *rahn* obyeknya yaitu barang yang dijadikan jaminan hutang sedangkan dalam akad *ijārah* obyeknya yaitu tempat penyimpanan, pemeliharaan dan keamanan barang yang dititipkan (*marhun*) selain itu akad tersebut didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep *Rahn* Pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo, yang ditulis oleh saudara Yuyun Khoirun Nisa pada tahun 2006. Untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana aplikasi konsep *rahn* yang terjadi di Pegadaian Syariah Sidoarjo 1. Bagaimana aplikasi konsep *rahn* (gadai syariah) di pegadaian syariah Sidoarjo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi konsep *rahn* dipegadaian syariah Sidoarjo?. Dalam praktik gadainya terdapat ketentuan kriteria barang jaminan yang dimiliki dan diterapkan, dimana pada cabang Pegadaian tersebut belum menerima semua jenis barang jaminan. Fokus pada kajian penelitian ini adalah pemberian kriteria barang jaminan pada produk gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo.¹⁵

Sedangkan pada penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Produk *Rahn* Investasi (Gadai Investasi) di PT. BNI Syariah

¹⁵ Yuyun Khoirun Nisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn Pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2006.

Kantor Cabang Syariah Surabaya, yang ditulis oleh saudara Meita Swavi Diana Sari pada tahun 2011, membahas tentang bagaimana produk *Rahn* investasi yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya yang dimana didalamnya menggunakan 3 akad dalam satu transaksi dan akad tersebut tidak terpisahkan. Dalam skripsi ini penelitiannya tersebut lebih fokus pada kegiatan gadai investasi yang dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya.¹⁶

Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya, yang ditulis oleh saudara Syaifuddin Muhammad pada tahun 2012, masalah yang dibahas dalam skripsi ini penentuan upah dengan sistem presentase ini bersifat fluktuatif mengikuti harga emas di pasaran untuk menjawab pertanyaan tersebut 1. Bagaimana standar penentuan upah penitipan gadai emas di PT Bank BNI Syariah cabang Surabaya? 2. Bagaimana standar penerapan upah penitipan gadai emas di PT Bank BNI Syariah cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam?. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan biaya yang sudah menjadi ketentuan diawal diawal akad dan menimbulkan ketidakjelasan pada nasabah tentang besarnya upah penitipannya, sehingga dalam pandangan hukum Islam mengandung unsur keharaman atau riba.¹⁷

¹⁶ Meita Swavi Diana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2011.

¹⁷ Syaifuddin Muhammad, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Standar Penentuan Upah Penitipan Gadai Emas di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan-Ampel Surabaya, 2012.

2. Sumber Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan di atas, maka sumber data yang diperlukan yaitu:

- a. Para nasabah yang melakukan pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rah*n Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- b. Manajer Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- c. Dokumen pembiayaan Syariah di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- d. Data tentang dalil *ujrah* dalam al-Qur'an, hadist dan buku-buku fiqh yang terkait:
 - 1) Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*,
 - 2) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,
 - 3) Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*,
 - 4) Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,
 - 5) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,
 - 6) Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi II*,
 - 7) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,
 - 8) Hamzah Ya'Kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*,
 - 9) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
 - 10) Helmin Karim, *Fiqh Muamalah*.
 - 11) Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,

- b. Analisis verifikatif yaitu menverifikatifkan (menguji) keselarasan *ujrah deposit box* pada produk pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rahn* usaha mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya dengan norma hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka skripsi ini nanti akan dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pembahasan dalam bab ini dipilah menjadi sembilan sub bab yaitu: Latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua bertajuk konsep *qard* dan *ijārah* menurut hukum Islam, pembahasan dalam bab ini dipilah menjadi dua sub bab yaitu: *qard* dan *ijārah*.

Bab ketiga adalah deskripsi penerapan *ujrah* pembiayaan *ARRUM* (*ar-rahn* usaha mikro) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya yang dipilah dalam dua sub meliputi: gambaran tentang pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya dan penerapan pembiayaan *ARRUM* (*ar-rahn* usaha mikro).

